



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI VIII DPR RI
DENGAN
MENTERI AGAMA RI**

Tahun Sidang	:	2020/2021
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja
Hari, Tanggal	:	Senin, 14 September 2020
Pukul	:	14.45 - 15.51 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Ketua Rapat	:	H. Yandri Susanto, S.Pt. (Ketua/Fraksi PAN)
Sekretaris Rapat	:	Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si. (Kabag Sekretariat Komisi VIII DPR RI)
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara	:	- Pendalaman Pembahasan RKA K/L TA. 2021 - Isu-isu Aktual dan Solusinya.
Anggota yang Hadir	:	48 Anggota dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI

PIMPINAN:

1. H. Yandri Susanto, S.Pt. (F-PAN)
2. M. R. Ihsan yunus, BA., B.Comm., Me.Con
(F-PDI Perjuangan)
3. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si. (F-PG)
4. Laksdya. TNI (Purn) Moekhlas Sidik, MPA. (F-Partai
Gerindra)
5. H. Marwan Dasopang (F-PKB)

ANGGOTA:

FRAKSI PDI PERJUANGAN

6. I Komang Koheri, SE.
7. Diah Pitaloka, S. Sos. M.Si.
8. Selly Andriany Gantina, A.Md.
9. Umar Bashor
10. Inna Ammania
11. Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya
12. I. G. N. Kesuma Kelakan, ST., M.Si.
13. H. Rachmat Hidayat, SH.
14. Matindas J. Rumambi, S.Sos.
15. Drs. Samsu Niang, M.Pd.
16. H. Arwan M. Aras T., S. Kom.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

17. H. John Kenedy Azis, SH.
18. Hj. Endang Maria Astuti, S.Ag., SH., MH.
19. Mohammad Saleh, SE.
20. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin, S.Sos., MM.
21. Muhammad Fauzi, SE.
22. Dra. Hj. Idah Syahidaj Rusli Habibie, M.H.
23. Muhammad Ali Ridha

FRAKSI PARTAI GERINDRA

24. M. Husni, S.E., M.M.
25. Dr.h. Jefry Romdonny, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.
26. Abdul Wachid
27. Drs. H. Zainul Arifin
28. H. Iwan Kurniawan, SH.
29. Drs. H. Saiful Rasyid, MM.

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT

30. Hj. Lisda Hendrajoni, SE., MM.Tr.
31. Dra. Delmeria
32. Nurhadi, S.Pd.
33. Ach. Fadil Muzakki Syah, S.Pd.I.
34. Satori, S.Pd.I., M.M.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

35. H. Maman Imanul Haq
36. Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.
37. H. An'im Falachuddin Mahrus

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

38. Drs. H. Achmad, M.Si.
39. Harmusa Oktaviani, S.E.
40. Wastam, S.E., S.H.
41. H. Hasani Bin Zuber, S.IP.
42. Ir. Nanang Samodra, KA., M.Sc.

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

43. KH. Bukhori, LC., MA.
44. H. Iskan Qolba Lubis, MA.
45. Dr. H.M. Hidayat Nurwahid, M.A.
46. Hj. Nur Azizah Tamhid, BA., MA.
47. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

48. H. Mhd. Asli Chaidir, SH.
49. H. Sungkono
50. M. Ali Taher

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

51. KH. Muslich Zainal Abidin
52. H. Iip Miftahul Choiri, S.Pd.I.

**Anggota yang Izin
Undangan**

: 4 orang Anggota Komisi VIII DPR RI
Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT/ F- PAN (H. YANDRI SUSANTO, S.Pt.):

Bissmillahirrahmaanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua.

**Yang terhormat Pak Menteri Agama Republik Indonesia beserta Pak Wamen dan seluruh jajaran Kementerian Agama Republik Indonesia;
Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII DPR RI;
Yang saya hormati para Anggota bagi yang ikut secara fisik, maupun secara virtual; dan
Hadirin yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, atas ridho dan rahmat-Nya kita pada siang hari ini bisa menyelenggarakan tugas konstitusional kita dalam keadaan sehat wal'afiat. Mudah-mudahan rapat kerja ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu sebelum kita memulai semua rangkaian rapat kerja pada sore hari ini, pada siang hari ini marilah kita berdoa kepada yang beragama Islam kita membaca *ummul kitab* dan kepada yang beragama lain menyesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Al Fatihah.

Terima kasih Pak Menteri atas kehadirannya beserta seluruh jajaran. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan acara-acara rapat-rapat di DPR Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020 – 2021 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi tanggal 13 Juli 2020. Dan sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI tanggal 18 Agustus 2020 maka pada hari ini Senin, 14 September 2020 Komisi VIII DPR RI menyelenggarakan rapat kerja dengan Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga Tahun Anggaran 2021 dan isu-isu aktual dan solusinya.

Hadirin yang berbahagia, Pak Menteri, para Anggota dan para Pimpinan yang kami hormati,

Berdasarkan laporan sekretariat Komisi VIII setelah isi absen secara fisik kehadiran anggota, dan Pak Menteri sesuai dengan surat edaran Pimpinan DPR Pak. Jadi sekarang maksimal 12 Anggota yang datang, maksimal pak. Jadi ini belum sampai maksimal 9 hampir saja mau maksimal, 30 secara virtual kemudian dari 9 fraksi. Oleh karena itu berdasarkan Tata Tertib DPR Pasal 251 Ayat (1) kuorum sudah tercapai. Oleh karena itu izinkan kami membuka Rapat Kerja ini dengan mengucapkan *Bissmillahirrahmanirrahim* Rapat Kerja ini saya buka dan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA DAN TERBUKA)

Baik.

Pak Menteri yang saya hormati.

Para Anggota dan para Pimpinan yang saya hormati.

Agenda kita pada hari ini yaitu:

1. Pengantar dari Pimpinan rapat;
2. Penjelasan dari Pak Menteri Agama Republik Indonesia mengenai
 - a. Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga Tahun Anggaran 2021;
 - b. Jika masih ada isu-isu aktual dan solusinya, tapi kalau tidak ada tidak perlu Pak Menteri kita fokus ke anggaran saja pak.
3. Tanya jawab dari para Anggota, tadi sudah saya sampaikan kepada para Anggota sebelum rapat, Pak Menteri akan memaparkan secara globalnya saja, nanti secara detail di sini para Eselon I kita akan perdalam dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I. Oleh karena itu kami minta kepada para Anggota nanti kalau jika pertanyaan itu menuju kepada Eselon I ya. Saya kira tidak perlu diungkapkan pada hari ini, mungkin besok atau lusa kita akan atur sedemikian rupa. Intinya kita mendengarkan penjelasan Pak Menteri secara global dan nanti kita akan perdalam.
4. Dari rangkaian acara tadi kita akan membuat sebuah kesimpulan dengan agenda yang sudah saya bacakan tadi.
5. Penutup.

Apakah 5 agenda yang saya bacakan tadi bisa kita setujui?

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik, kita mulai rapat pukul 14.15 WIB eh 14.45 WIB berakhir pukul 16.00 WIB ya? Mudah-mudahan tepat waktu kalau ada betul-betul urgen bisa kita pertimbangkan untuk memperpanjang waktu. Setuju sampai pukul 16.00 WIB?

Setuju ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik.

Pak Menteri yang saya hormati.

Para Anggota dan para Pimpinan yang saya hormati.

Rapat Kerja pada hari ini memiliki makna yang sangat strategis karena membahas rencana anggaran dari Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 dan sekaligus membahas isu-isu aktual terhadap Covid-19 di lingkungan Kementerian Agama. Rapat pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama tanggal 8 September 2020 yang lalu mengenai pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2021 serta isu-isu aktual dan solusinya. Komisi VIII

belum melakukan pembahasan karena kemarin kita membahas beberapa isu aktual. Alhamdulillah respons dari Pak Menteri sangat cepat, sangat aktif dan tentu kami ucapkan terima kasih Pak Menteri atas respons isu-isu aktual yang sudah kami sampaikan dan direspons positif oleh Pak Menteri.

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 26 Juni 2020 lalu telah menyetujui pagu indikatif Kementerian Agama Republik Indonesia dalam RAPBN tahun 2021 sebesar Rp.66.673.486.995.000,- Namun Komisi VIII DPR RI memberikan catatan kesimpulan dalam Rapat Kerja tersebut bahwa belum menyetujui kegiatan prioritas RKP Kementerian Agama tahun 2021 tersebut dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai alokasi anggaran kegiatan prioritas RKP pada waktu yang akan ditentukan. Saya kira ini sekali lagi pendalaman nanti ditingkat RDP.

Selanjutnya, Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan meninjau kembali rencana program dan anggaran dalam pagu indikatif RAPBN tahun 2021 dan usulan tambahannya, agar lebih fokus pada peningkatan kualitas fungsi agama, dan pendidikan keagamaan seperti anggaran tunjangan profesi guru *inpassing*, pemberian bantuan dalam penanggulangan dampak wabah Covid-19, dan untuk ustaz dan tenaga pendidik keagamaan, peningkatan sarana dan prasarana madrasah, pesantren-pesantren, pendidikan keagamaan, dan tempat ibadah serta perguruan tinggi keagamaan Islam negeri.

Kemudian Komisi VIII DPR RI juga mengingatkan Pak Menteri Agama sesuai dengan keputusan kemarin Pak Menteri bahwa kita insyaallah pemotongan dana BOS itu tidak dilakukan. Dan sekali lagi kami terima kasih Pak atas respons dari keluarga besar madrasah se-Indonesia saya kira berterima kasih kepada Pak Menteri Oak.

Kemudian kami juga ingin melihat bagaimana rincian dari anggaran tambahan yang sudah disetujui pada rapat beberapa hari yang lalu sebesar Rp.3.836.824.257.000,- yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh antara lain untuk keperluan subsidi kuota internet siswa, guru, dan dosen termasuk bantuan langsung tunai bagi para guru di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Oleh karena itu pada Rapat Kerja hari ini kami ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Menteri Agama yaitu:

1. Apa saja rencana program kerja dan anggaran Kementerian Agama tahun 2021 dan dialokasikan untuk program prioritas apa saja? Serta apakah program kerja dan anggaran tersebut telah memperhatikan hasil keputusan Raker Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama beberapa waktu yang lalu?
2. Apakah target yang hendak dicapai pada program kegiatan dan anggaran Kementerian Agama pada tahun 2021, yang dapat diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif?
3. Apakah ada kebijakan program inisiatif baru di tahun 2021? Dan program apa saja yang bersifat *multi years*?

4. Bagaimana progres pengembalian dana BOS madrasah, ini juga pertanyaannya banyak juga? Saya kira kalau bisa disinggung nanti Pak Menteri dananya dari mana? Walaupun saya kemarin pak Dirjen Pendis mana ini? Oke ya terima kasih Pak Dirjen kemarin ke pesantren saya Pak, menyerahkan bantuan operasional pesantren dan TPA beserta Pak Dr. Waryono Doktor pontrennya, terima kasih.

Kemudian, kalau sudah dijelaskan saya kira mudah-mudahan madrasah-madrasah bisa tenang kembali Pak Menteri.

Yang terakhir mungkin satu saja Pak, kita ikut prihatin Pak Menteri kemarin ada kejadian penusukan di Lampung Pak. Kejadian di Lampung di masjid kita berharap ini tidak terjadi kembali, karena bagaimanapun masjid itu tempat yang paling aman seharusnya. Gitu yang Wamen? Bukan untuk kekerasan, kita tetap sekali lagi Pak mengutuk keras siapa pun melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah, tidak berdosa, dari agama mana pun, dari suku mana pun, dari daerah mana pun itu kita tidak memperbolehkan orang melakukan kekerasan terhadap orang lain.

Oleh karena itu dari meja Pimpinan kami mengutuk keras dan ikut prihatin. Oleh karena itu kami minta kepada aparat Kepolisian yang memang mempunyai tugas dari negara untuk mengusut tuntas penusukan terhadap salah satu ulama kita di masjid di Bandar Lampung. Mudah-mudahan segala wak sangka atau interpretasi, analisa di tengah masyarakat itu terlalu liar Pak Menteri, sehingga kita minta kepada pak polisi untuk mengungkap ini secara tuntas, apa motif di balik itu? Dan bagaimana kronologis kejadian yang sebenarnya? Kalau itu diungkap mudah-mudahan kecurigaan, analisa yang bukan-bukan itu bisa kita hindarkan ditengah-tengah masyarakat.

Saya kira itu Pak Menteri pengantar dari kami, sekali lagi para Anggota Pak Husni, Pak Jefry, Ibu Selly, Pak Moekhlas, tadi sesuai dengan yang kita sepakati untuk memperdalam nanti di tingkat RDP Pak Husni. Sekarang Pak Menteri hanya menyampaikan globalnya saja, nanti kita perdalam dengan masing-masing eselon I. Oleh karena itu kami persilakan Pak Menteri untuk menyampaikan sesuai dengan agenda rapat pada hari ini. Kepada pak Menteri kami persilakan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL (PURN) FACHRUL RAZI):

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI,

Yang terhormat hadirin yang berbahagia.

Sebagai pendahuluan pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas taufik dan hidayah-Nya kita dapat melaksanakan Rapat Kerja pada hari ini dalam rangka pembahasan RKA K/L Kementerian Agama Tahun Anggaran 2021. Rapat kerja hari ini merupakan tindaklanjut Surat Undangan Pimpinan DPR RI Nomor AG.10633/DPR RI/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang Undangan Rapat Kerja.

Pada kesempatan yang baik ini perkenankan kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat yang senantiasa memberikan motivasi, perhatian, dan dukungan terhadap upaya peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran sehingga Kementerian Agama secara bertahap dapat meningkatkan kualitas bimbingan dan pelayanan kepada umat beragama di Indonesia.

Selanjutnya, kami akan menyampaikan pagu anggaran Kementerian Agama tahun 2021 sebagai dasar penyusunan RKA kementerian atau lembaga Kementerian Agama, sedangkan untuk isu-isu aktual telah kami sampaikan dalam rapat kerja sebelumnya.

Yang kedua tentang RKA K/L Kementerian Agama tahun anggaran 2021. Dalam rangka pencapaian sasaran strategis sebagaimana dalam RPJMN tahun 2020 – 2024 dan Renstra Kementerian Agama tahun 2020 – 2024 Kementerian Agama pada tahun 2021 telah memperoleh pagu anggaran sebesar Rp.66.961.386.828.000,-. Besaran pagu tersebut sesuai surat bersama Menteri Keuangan Nomor S.692/MK.02/2020 dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor B636.M.PPN.D8-KU/0101/08/2020 tanggal 5 Agustus 2020 tentang pagu anggaran Kementerian Lembaga dan penyelesaian rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga tahun anggaran 2021.

Pagu anggaran Kementerian Agama tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp.287.899.833.000,- atau sebesar (0,43%) bila dibandingkan dengan pagu indikatif Kementerian Agama tahun 2021, mohon maaf sebesar Rp.66.673.486.995.000,- Kenaikan terdapat pada fungsi pendidikan untuk tambahan biaya TPG guru non PNS, pengembangan pondok pesantren dan KIP kuliah pada Dirjen Pendidikan Islam, Dirjen Bimas Kristen, dan Dirjen Bimas Katolik.

Berikut tabel perbandingan antara pagu indikatif dan pagu anggaran pada unit Eselon I Kementerian Agama tahun 2021.

1. Sekretariat Jenderal:

Pagu indikatifnya sebesar Rp.2.280.046.995.000,- atau dibandingkan dengan jumlah total (3,4%). Tapi pada anggaran tahun 2021 naik menjadi sebesar Rp.2.280.046.995.000,- ada kenaikan (3,41%). Mohon maaf keseluruhan yang dibandingkan dengan jumlah anggaran (3,41%) jadi dengan demikian ada penurunan (0,01%).

2. Inspektorat Jenderal:

Pagu indikatifnya sebesar Rp.170.124.955.000,- atau (0,26%) dari keseluruhan pagu indikatif. Kemudian ada selisih menjadi ada penurunan menjadi Rp.170.124.995.000,- mohon maaf tidak ada kenaikan, menjadi jumlahnya (0,5%).

3. Demikian juga Dirjen Pendidikan Islam ada kenaikan sedikit dari (78,39%) menjadi (78,44%).

4. Dirjen Bimas Islam ada penurunan dari (8,64%) menjadi (8,60%).

5. Dirjen Bimas Kristen ada kenaikan dari (2,78%) menjadi (2,79%).
6. Dirjen Bimas Katolik ada kenaikan dari (1,32%) menjadi (1,34%).
7. Dirjen Bimas Hindu dari (1,21%) turun menjadi (1,20%).
8. Dirjen Bimas Budha dari (0,41%) tetap.
9. Dirjen Haji dan Umroh dari (2,39%) turun menjadi (2,38%).
10. Badan Litbang dan Diklat dari (1,04%) tetap (1,04%).
11. Badan Penyelenggara JPH dari (0,15%) sampai (0,18%).

Dengan demikian pagu indikatif tahun 2021 jumlahnya sebesar Rp.66.673.486.995.000,- menjadi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.66.961.386.828.000,-.

Adapun besaran pagu anggaran tahun 2021 berdasarkan fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Agama sejumlah (16,54%) yaitu Rp.11.075.918.925.000,-
 2. Fungsi Pendidikan sejumlah (83,46%) yaitu Rp.55.885.467.903.000,-
- Jumlah sebagaimana di atas tadi Rp.66.961.386.828.000,-

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Agama anggaran pada fungsi pendidikan lebih banyak daripada fungsi agama. Fungsi pendidikan yaitu sebesar Rp.55.885.497.903.000,- atau (83,46%). Sedangkan fungsi agama hanya (16,54%) atau Rp.11.075.918.925.000,-.

Adapun rincian pagu anggaran Kementerian Agama tahun 2021 berdasarkan sumber dana, program dan jenis belanja pengeluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran I nanti akan kami sampaikan.

Selanjutnya Pagu Anggaran Kementerian Agama tahun 2021 akan dipergunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi di Kementerian Agama dalam rangka pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam pembangunan dibidang agama dan pendidikan keagamaan. Beberapa kegiatan dan rencana kerja Pemerintah Kementerian Agama baik yang bersifat kelanjutan maupun yang bersifat inisiatif baru yang akan diselenggarakan pada tahun 2021 adalah sebagaimana kami sajikan dalam lampiran II.

Berkenaan dengan kegiatan terkait Covid-19 perlu kami sampaikan bahwa mengingat pandemi Covid-19 ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, Kementerian Agama terus berupaya untuk tetap mengalokasikan anggaran tahun 2021 dalam rangka melaksanakan kegiatan mitigasi, dan responsif Covid-19 sebesar Rp.2.983.063.882.000,-. Kegiatan mitigasi dan responsif Covid-19 tersebut antara lain:

1. Penyediaan sarana pencegahan penyebaran Covid-19 seperti *hand sanitizer*, masker kain, face shield, vitamin, *thermogun*, penyemprotan disinfektan dan biaya *rapid test*, serta PCR atau Swab di lingkungan Kementerian Agama pusat sampai tingkat kabupaten/kota.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung *work from home* dan pembelajaran jarak jauh.
3. Pemenuhan belanja operasional asrama haji yang penerimaannya terdampak Covid-19.
4. Bantuan pemberdayaan ekonomi keluarga yang terdampak Covid-19.
5. Bantuan bagi penyuluh agama non PNS, APD, masker, *hand sanitizer* dan vitamin.
6. Bantuan operasional ormas keagamaan.
7. Bantuan kitab suci bagi rumah sakit rujukan Covid-19.
8. Bantuan operasional sarana prasarana protokol kesehatan bagi rumah ibadah.
9. Bantuan operasional pada pondok pesantren. Bantuan insentif untuk ustaz pondok pesantren, bantuan fasilitas kesehatan pesantren.
10. Bantuan lembaga kemahasiswaan PTKI.
11. Bantuan pelaksanaan program pembelajaran jarak jauh untuk dosen, guru, mahasiswa-mahasiswi, dan siswa-siswi yang terdampak Covid-19.
12. Bantuan pemberdayaan MKKG, MGMP, Pokja pengawasan.
13. Bantuan sarana pencegahan penyebaran Covid-19 seperti *hand sanitizer*, masker kain, face shield, vitamin penambah daya tahan tubuh, *thermogun*, penyemprotan disinfektan dan biaya rapid test, PCR atau Swab dilingkungan perguruan tinggi keagamaan.

Adapun kegiatan mitigasi dan responsif Covid-19 Kementerian Agama tahun 2021 pada masing-masing unit Eselon I kami sampaikan dalam lampiran III. Untuk selanjutnya penjelasan rencana kegiatan dan anggaran tahun 2021 secara detail pada masing-masing program dan unit kerja dapat dilakukan dalam forum Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR dengan unit Eselon I Kementerian Agama.

Sebagai penutup sebelum kami masuk pada lampiran, pada pembahasan RKA K/L tahun 2021 ini, kami berharap Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat tetap memberikan masukan dan saran kepada kami, serta memberikan dukungan terhadap rencana kerja kami. Sehingga tugas dan fungsi Kementerian Agama berjalan lancar dan kinerja bimbingan dan pelayanan kepada umat beragama semakin mantap pada masa yang akan datang.

Sebagai penutup demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan dalam rapat kerja pada hari ini membicarakan pembahasan RKA K/L Kementerian Agama tahun anggaran 2021. Besar harapan kami agar dukungan dan persetujuan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat, dalam perencanaan dan penganggaran yang kami sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada

Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang terhormat atas perhatian dan kerja sama dalam peningkatan kinerja Kementerian Agama. Kita masuk pada lampiran I

KETUA RAPAT:

Pak Menteri mohon maaf Pak, kalau lampirannya saya kira tidak perlu disampaikan Pak.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL (PURN) FACHRUL RAZI):

Baik.

Oke kalau begitu kami sampaikan saja tentang masalah tadi yang bapak minta kami jelaskan rinciannya. Tentang dana Rp.3.853.635.868.000,- ini untuk pembiayaan perancangan jarak jauh dengan rincian masing-masing unit Eselon I sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal jumlahnya sebesar Rp.229.200.000,-
2. Di Dirjen Pendidikan Islam jumlahnya sebesar Rp.3.793.949.216.000,-
3. Dirjen Bimbingan Masyarakat Kristen jumlahnya sebesar Rp.29.144.860.000,-
4. Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik jumlahnya sebesar Rp.23.750.792.000,-
5. Dirjen Bimbingan Masyarakat Hindu jumlahnya sebesar Rp.5.560.800.000,-
6. Dirjen Bimbingan Masyarakat Budha jumlahnya sebesar Rp.1.001.000.000,-

Jumlahnya sebesar Rp.3.853.635.868.000,- rinciannya adalah agak panjang misalnya mohon maaf.

- a. Di bidang Dirjen Pendidikan Islam ada subsidi pembelajaran jarak jauh madrasah, bantuan subsidi kuota internet untuk guru dan dosen, bantuan subsidi kuota internet untuk mahasiswa, bantuan langsung tunai guru RA, guru madrasah dan guru PHI non PNS.
- b. Di bidang Dirjen Bimas Kristen ada subsidi anggaran pembelajaran jarak jauh pada SD TK, SMP TK, SMTK dan SMAK. Kemudian ada bantuan subsidi kuota internet untuk guru dan dosen, ada bantuan subsidi kota internet untuk mahasiswa, bantuan langsung tunai guru dan dosen non PNS.
- c. Di bidang Dirjen Bimas Katolik juga hampir sama ada bantuan subsidi kuota internet untuk guru dan dosen, subsidi penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh bagi siswa, bantuan subsidi kuota internet untuk mahasiswa, bantuan langsung tunai guru agama Katolik non PNS.

- d. Di bidang Dirjen Bimas Hindu juga demikian, ada bantuan subsidi kuota internet untuk dosen, bantuan subsidi kuota internet untuk mahasiswa.
- e. Di bidang Dirjen Bimas Budha bantuan subsidi kuota internet untuk guru dan dosen, bantuan subsidi kuota internet untuk siswa dan mahasiswa.
- f. Di bidang Kesekretariatan Jenderal Agama Konghucu juga bantuan subsidi kuota internet untuk guru dan dosen, bantuan subsidi kuota internet siswa dan mahasiswa.

Itu yang kami sampaikan memang masih banyak rincian lain, tetapi itu rincian garis besarnya seperti itu. Dengan hormat kami laporkan saya kembalikan kepada bapak Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya. Secara garis besar dari Pagu Indikatif beralih ke rencana kerja. Pertama kami mengapresiasi tadi uraian Pak Menteri yang 3,8 triliun Pak saya kira itu kabar baik bagi anak bangsa yang di Kementerian Agama. Kami mengapresiasi gerak cepat dari Kementerian Agama termasuk kami juga mendengar dan membaca langsung ada sekitar 2 hampir 3 triliun untuk anggaran 2021 yang memang fokus kepada penanganan Covid. Saya kira ini sejalan dengan hasil rapat kerja kita beberapa waktu yang lalu Pak Menteri.

Kemudian dari fungsi anggaran kelihatan juga keberpihakan Kementerian Agama untuk memajukan dunia pendidikan kita terutama sumber daya manusia, itu (83,48%). Saya kira ini sekali lagi kami memberikan apresiasi dari Kementerian Agama untuk paparan anggarannya sangat bagus dan ini bisa kita perdalam di Rapat Dengar Pendapat nanti. Tapi bagi Anggota atau dari meja Pimpinan yang mau menyampaikan hal-hal yang urgen di hadapan Pak Menteri silakan. Tapi kalau dosisnya di depan Pak Dirjen tidak usah disampaikan di depan Pak Menteri, atau buat Pak Sekjen misalkan, tidak usah disampaikan ke Pak Menteri. Ini khusus untuk Pak Menteri saja. Silakan kalau masih ada. Silakan Ibu Selly dari PDIP, kedua Pak Jefry dari Gerindra.

F- PDIP (SELLY ANDRIANY GANTINA, A.Md.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan beserta jajaran Anggota baik yang fisik dan virtual.

Yang saya hormati Pak Menteri beserta jajaran, Pak Wamen.

Berbahagia sekali pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita sudah mendapatkan pemaparan terkait dengan RKA K/L Kementerian Agama. Seyogyanya, ini yang menjadi harus, pembahasan ini harusnya

dibahas dari jauh-jauh hari. Kalau untuk saya pribadi Pak dengan anggaran yang tidak jauh berbeda dari tahun 2020, perlu menjadi sorotan dan catatan kita, ada apa? Padahal kita tahu di anggaran 2020 ini banyak anggaran yang direalokasi dan *refocussing* untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat Covid-19.

Dan kemarin saya juga mengikuti Webinar apa yang disampaikan oleh beberapa menteri ke Kemenko, bahwa kemungkinan Covid-19 ini kan tidak akan selesai di tahun 2020, bahkan vaksin saja baru akan diluncurkan pada awal tahun 2021. Jadi kalau kita bicara Covid-19 maka ada tiga hal penting yang perlu menjadi catatan kita, pertama masalah kesehatan, yang kedua ekonomi dan ketiga politik.

Kenapa saya berbicara politik? Karena bertepatan pada saat Covid-19 sekarang berlangsung kita akan melakukan pesta demokrasi pelaksanaan Pilkada serentak yang tentu saja ini akan mengganggu, mengganggu kondisi negara kita. Saat ini posisi penderita Covid-19 ini sudah lebih hampir 300.000 baru 250 sekian. Kalau pada posisi sekarang bulan September saja sudah seperti itu bagaimana dengan pelaksanaan Pilkada yang akan dilaksanakan pada akhir Desember 2020, dimana ada 305.000 TPS di situ semua orang akan berkumpul, dan akan ada sekitar 100.000.000 orang berkumpul dalam kondisi Covid-19.

Bahkan diprediksi oleh beberapa ahli kemudian beberapa orang yang memang mengerti tentang Covid-19, kemungkinan puncaknya Covid-19 ini tidak diantisipasi oleh pemerintah itu di bulan Februari akan ada 19.000.000 rakyat Indonesia yang terpapar Covid-19. Artinya kalau kita berbicara anggaran tahun 2021 pada saat tadi dipaparkan oleh bahwa untuk mengantisipasi dalam fungsi pendidikan yang mengantisipasi masalah proses Daring, kemudian masalah tenaga pengajar dan lain sebagainya sudah diantisipasi untuk mitigasi dan responsif Covid-19 hanya sebesar Rp.2,8 triliun, padahal di tahun 2020 sekarang saja untuk Daring sudah Rp.3,8 triliun. Ini mau seperti apa pak?

Jadi memang harus ada pemikiran yang cermat Pak Sekjen, tolong untuk nanti kita pembahasan lebih detail, apakah masih memungkinkan untuk sektor pendidikan ini kita juga fokus ke arah sana? Karena Covid-19 ini tidak akan tuntas di tahun 2020. Di tahun 2021 pun kalau ternyata Pilkada serentak ini tetap dilaksanakan di akhir bulan Desember, sementara ada pemilih pemula yang anak-anak sekolah yang memang mereka mempunyai hak untuk memilih dan terpapar akan seperti apa? Jadi maksud saya bahwa program-program anggaran yang akan dibuat ke depan ini juga harus betul-betul cermat kemudian memperhatikan kondisi *next* seperti apa? Itu yang pertama.

Yang kedua saya juga mengapresiasi dengan apa yang sudah dipaparkan oleh pak Menteri, bahwa kami menginginkan bahwa ke depan dana transfer daerah juga menjadi perhatian kita bersama. Kami tahu bahwa ujung tombak bapak di bawah ini adalah para penyuluh. Para penyuluh ini tentu saja akan kaitannya dengan masalah kesejahteraan mereka dan lain-lain sebagainya. Maka mohon kiranya ada perhatian dari kita tentang keberadaan Kemenag di kabupaten/kota maupun di setiap provinsi. Jangan sampai ada disparitas karena yang saya khawatirkan pada saat terjadi sesuatu

yang tidak kita inginkan, maka ini akan membuat seolah-olah Kementerian Agama ini seperti pemadam kebakaran Pak. Baru terjadi sesuatu baru kita melaksanakan. Padahal kalau saya mendapatkan paparan dari bapak pada pertemuan sebelumnya bapak pernah berbicara bahwa Kementerian Agama ada satu program unggulan mengenai moderasi beragama di tahun 2021. Bahkan dicanangkan akan menggunakan anggaran sebesar 3 triliun sekian, tetapi kalau saya buka ternyata hanya 350 miliar.

Artinya program yang bapak tawarkan kepada kami tentang moderasi beragama, tentang fungsi pendidikan dan fungsi agama seharusnya ini menjadi PR kita juga ini Pak. Saya tidak mau dalam kondisi politik yang tidak jelas ini, gara-gara sesuatu yang tidak bisa kita tangani, terutama masalah perut akhirnya justru akan membuat kita seperti pemadam kebakaran.

Nah mengenai moderasi beragama, saya sangat setuju bahkan bapak sampaikan sebelum di beberapa pertemuan sebelumnya, akan memperkuat keberadaan dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama). Forum kerukunan umat beragama di daerah ini kan memang tidak kita perhatikan dengan sangat baik Pak. Jadi anggarannya pun mereka tidak ada, maka dengan 300 miliar sekian ini yang saya tidak tahu nanti akan seperti apa? Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan bapak bahwa dari anggaran detailnya nanti kita akan bahas pertemuan RKA K/L dengan Eselon I.

Tapi ada satu hal pak saya bangga bapak sudah mulai melakukan reformasi birokrasi di instansi Bapak baru ditingkat pusat, tapi bagaimana dengan ditingkat daerah? Harus saya sampaikan pak program bapak sangat baik sekali tapi ternyata di daerah bapak juga harus membenahi dong, keberadaan kaki-kaki tangan Bapak yang memang menjadi ujung tombak Bapak. Tidak semua, tetapi adalah orang-orang yang memang harus menjadi perhatian Bapak. Saya mengapresiasi bapak sudah melakukan perbaikan di jajaran Bapak. Tetapi mengenai program-program yang bapak gulirkan konotasi masyarakat penerima bantuan terutama dari lembaga-lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama, masih berpikiran kok masih tetap sama ya dengan yang selama ini? Katanya Menteri melakukan perubahan, melakukan reformasi birokrasi tetapi ternyata di bawahnya masih tetap sama. Kenapa saya harus sampaikan kepada Bapak? Karena program-program yang bapak gulirkan seperti halnya kemarin bantuan operasional kepada pesantren banyak yang dipotong pak.

KETUA RAPAT:

Bisa dipersingkat Bu?

F-PDIP (SELLY ANDRIANI GANTINA):

Ya. Bahkan saya ingin bertanya kepada bapak langsung saya mempunyai catatan di sini saya sebetulnya ingin tahu juga selain melalui pintu wakil rakyat, kemudian BOP yang memang disalurkan kepada kabupaten/kota ini kira-kira ada pintu jalur mana saja? Karena setahu saya di daerah, di semua daerah masih ada SKDP, FKTPQ yang memang sama-sama

menyalurkan untuk bantuan operasional kepada lembaga-lembaga tadi. Tetapi yang mengerikan Pimpinan, di daerah saya para penerima bantuan langsung di potong Rp.4.000.000,- dari Rp.10.000.000,- yang seharusnya diterima oleh mereka, dengan alasannya untuk membeli alat kesehatan.

Nah menurut saya apakah memang ini ada arahannya dari Kementerian Agama? Dan seharusnya dipertanyakan dulu *dong* kepada lembaga tadi mau dipotong atau tidak? Tetapi mereka langsung dipotong sebesar sekian. Ini membuat saya malu, karena pada beberapa pertemuan sebelumnya saya sampaikan biaya operasional dari Pemerintah atau Kementerian Agama tidak ada pemotongan sama sekali. Nah ini menjadi catatan pak Pimpinan dan bahkan saya harus sampaikan juga kepada bapak-bapak sekalian, dari yang diusulkan oleh kami saya bersyukur alhamdulillah banyak yang terealisasi Pak, banyak yang terealisasi. Tapi sayangnya suratnya tidak melalui kami. Yang melalui kami saya pribadi hanya 25 tetapi sisanya melalui lembaga lain.

Nah ini menjadi catatan kita. Sampai orang di bawahnya sendiri bingung, Bu kami tidak mengusulkan kepada lembaga FKDT tetapi kok formulirnya ada di situ ya Bu? Bahkan kami langsung dipotong, nah saya jadi bingung juga ini, mungkin ini perlu pembenahan Pak Pimpinan, kalau perlu memang setiap penerima BOP ini diumumkan secara jelas, jadi kita bisa tahu di daerah ini siapa yang menerima? Kemudian transparansinya seperti apa? Bahkan kalau menurut saya reformasi birokrasi dimulai dari diri kita sendiri pak, jadi sebelum memperhatikan orang lain mungkin bapak juga rasa memperhatikan kesejahteraan perangkat kaki-kaki Bapak yang ada di bawah. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Mohon yang lain nanti tidak sepanjang ibu Selly! Ya kalau BOP itu bu Selly saya di depan pak Dirjen, di depan Direktur Ponten kemarin saya umumkan pak Menteri, tidak ada pemotongan satu senpun. Nah gitu itu selesai, kita umumkan terbuka Pak. Kalau ada yang motong-motong laporkan ke Kementerian Agama ke Anggota DPR, itu berkali-kali ya pak Dirjen saya sampaikan kemarin. Maka kalau ada di daerah-daerah yang dipotong-potong ya saya kira itu menjadi tanggung jawab kita semua bukan hanya Kementerian Agama. Kita usut saja Bu Selly tidak usah menunggu yang lain kita ini saja, kalau itu uang untuk rakyat, bukan uang untuk yang dipotong-potong. Silakan Pak Jefry Romdoni dari fraksi Gerindra.

F- PARTAI GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, S.E., S.Sos., M.Si., M.M.):

Bissmillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, dan

Yang terhormat Pak Menteri Agama beserta jajarannya.

Sebelum menyampaikan beberapa pandangan dan pertanyaan saya ingin menyampaikan *Innalillahi wa inna ilaihi ra ji'un* atas penikaman terhadap ulama kita Syeikh Ali Salim Muhammad Ali Jaber. Semoga kejadian kekerasan ini merupakan kejadian terakhir yang menimpa para ulama kita, dan saya juga meminta kepada Komisi VIII dan juga Pak Menteri untuk memberikan perhatian terhadap kasus ini, sehingga jelas motifnya apa? Tujuannya apa? Dan siapa dibalik ini semua? Dan saya juga minta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk aktif memberikan perlindungan kepada ulama dari teror dan kekerasan, sehingga kejadian seperti tadi tidak perlu terulang karena ulama ini merupakan aset bangsa dan juga perekat bangsa.

Kemudian berikutnya, saya juga ucapkan selamat untuk Kementerian Agama terutama Dirjen Pendis atas kenaikan pagu anggarannya. Semoga kedepan menjadi sinergis dengan Komisi VIII agar semakin lancar kinerjanya dengan dukungan penuh Komisi VIII untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam dan peserta didik yang berakhlakul karimah. Dan juga saya secara pribadi juga insyaallah Komisi VIII juga akan selalu mendukung, namun demikian akan lebih baik lagi jika bagian dari warga bangsa juga yaitu madrasah swasta juga diperhatikan dan dialokasikan anggarannya. Madrasah swasta di semua tingkatannya adalah pejuang pendidikan agama yang membantu Kemenag. Terkait dengan itu, terkait dengan kenaikan anggaran ini tolong Dirjen Pendis juga mengalokasikan anggaran untuk madrasah swasta.

Kemudian daripada isu aktual bahwa sebagian pesantren menjadi klaster Covid-19 adalah fakta yang harus kita hadapi dengan bijak. Jadi jangan sampai memberikan stigma negatif kepada pesantren. Yang terpapar harus disembuhkan, yang sehat harus dijaga kesehatannya. Muaranya adalah protokol kesehatan yang harus dilaksanakan dengan baik. Dalam konteks ini tentunya Kementerian Agama harus fokus berupaya penerapan protokol kesehatan secara maksimal di pesantren, BOP bulanan untuk melawan Covid-19 ini dalam kurun waktu 3 sampai 6 bulan ke depan menjadi salah satu alternatif solusi yang nantinya memang patut dikaji. Demikian yang saya sampaikan terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Memang kalau Pak Jeffry ini tidak suka yang lebar-lebar pak, pendek saja ya, luar biasa. Ini pesan ke Dirjen Pendis ini Pak. Kita juga terima kasih kepada pak Menteri Agama yang sudah memulai kepedulian kepada madrasah swasta pak. Madrasah swasta, terus pondok pesantren. Saya kira ini patut kita pertahankan pak Dirjen Pendis untuk ke depannya.

Kami persilakan Pak Husni dari Gerindra, kemudian Pak Nurhasan tanya juga? Oh ya oke.

F- PARTAI GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati bapak Pimpinan Komisi VIII Pak H. Yandri, Laksamana Moekhlas.

Yang saya hormati teman-teman saya yang hadir di Komisi VIII maupun yang virtual.

Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, dan seluruh para Dirjen dan jajarannya.

Kemarin Pak Menteri saya yang dana BOP sudah yang sudah saya terima saya sudah serahkan kepada yang berhak. Itu kebetulan saya ada bagi diwilayah Sumut, di wilayah Aceh dan juga di wilayah Madura alhamdulillah para ustaz, para ulama, para kyai, santri dan lain sebagainya mengirimkan salam untuk Pak Menteri Agama semoga sehat dan panjang umur.

Kemudian juga pak Menteri di dalam BOP, BOP yang saya terima di Sumatera Utara ini ada terjadi kesalahan di dalam penyerahannya. Persis yang dikatakan tadi Ibu Selly. Saya kebetulan anu pak Menteri, saya punya pesantren saya urus untuk BOP-nya. Tapi waktu saya terima bukan melalui tangan saya, melalui tangan orang lain, dan juga apa yang dikatakan ibu Selly tadi ada juga lembaga-lembaga yang melakukan pemotongan-pemotongan. Jadi kebetulan ya ada melalui tangan saya tapi penyerahannya bukan lewat saya. Mereka bilang Pak kami dipotong, kasih tahu siapa yang potong itu biar saya potong saja sekalian. Iya betul Pak, karena kebetulan saya dulu Komisi III, Kapolda masih berkawan sama kita kan.

Kemudian juga ya mudah-mudahan untuk ke depan lebih tertiblah administrasinya ya. Kemudian juga saya juga sudah sampaikan masalah yang BOS yang dikembalikan ke para-pemilik pesantren dan sebagainya. Mereka mengucapkan sangat terima kasih. Cuma katanya kalau bisa realisasinya lebih cepat gitu saja.

Pak Ketua ada satu hal dari Pak Menteri ini memang saya betul-betul apresiasi waktu kami ke Papua kemarin tentang masalah kerukunan umat beragama. Itu waktu itu dicanangkan oleh Pak Menteri dari Aceh sampai ke Papua. Jadi itu sama saja Pak Ketua waktu konflik di Aceh dimana-mana ditempel stiker damai itu indah. Jadi saya pikir biaya yang paling murah untuk menjamin sebuah kerukunan umat beragama, saya pikir seperti yang Pak Menteri lakukan yaitu melakukan pendekatan-pendekatan dari hati ke hati. Saya Pak Menteri kalau yang bagus, bagus saya bilang nah itulah dia, kita *fair* saja.

Kemudian Pak Menteri tadi kegiatan mitigasi dan responsif Covid-19 tersebut antara lain saya ada membaca di sini Pak Menteri, poin ke 13

bantuan sarana pencegahan penyebaran Covid-19 *hand sanitizer*, masker, face shield, vitamin dan lain sebagainya ya untuk dibantu, tapi dilingkungan perguruan tinggi keagamaan. Tapi hari ini kita belum banyak kan belum diadakan anu apa? Tatap muka. Jadi hal seperti ini ya Pak lebih bagus dibantu pesantren-pesantren yang sudah dibuka ya. Kalau boleh ini pak Menteri. Karena sekarang banyak pesantren yang sudah buka dan melakukan tatap muka, karena sudah pasti mereka jauh lebih membutuhkannya. Karena tadi waktu juga dibatasi sama Ketua, satu lagi pak Menteri itu Kakanwil Sumut itu masih Plt Pak. Jadi kalau bisa cepat-cepat definitiflah, nanti kalau susah cari orang kita bantulah cari orang. Saya rasa hanya segitu ya pak Menteri, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Saking banyak orangnya jadi susah milihnya Pak, bukan tidak banyak orang. Silakan pak Nurhasan dari PKS.

F- PKS (H. NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I):

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pimpinan Komisi.

Yang saya hormati Pak Menteri Agama, Pak Wamen, para Dirjen, Sekjen dan seluruh jajarannya.

Pertama-tama saya terima kasih atas paparan pak Menteri Agama, saya baca dalam paparannya cukup menggembirakan atas perhatian Kementerian Agama terhadap perhatian terhadap pembangunan kebangsaan dalam keberagaman dan fungsi pendidikan Islam. Tentu catatan-catatan penting ini pertama-tama saya ucapkan terima kasih mulai titik terang bantuan Kementerian Agama terhadap kami terutama di daerah pemilihan. Walaupun sentuhan sedikit tapi rasa cinta Kementerian Agama terhadap perhatian keagamaan terutama pesantren, madrasah diniyah, dan pendidikan Al Quran sudah mulai titik terang *jazakumullah khairan*.

Kemudian dalam fungsi pendidikan keagamaan dan pendidikan dan fungsi agama, dari kegiatan mitigasi dan responsif terhadap Covid-19 tersebut di sini beberapa poin yang saya catat. Pertama di poin yang ke 4 halaman 4 ini atau di poin 1 dan seluruhnya saya apresiasi seperti pemanfaatan teknologi informasi, karena masyarakat di bawah selalu membandingkan antara perhatian Kemendikbud dengan Kementerian Agama. Sepertinya jauh gitu dalam perhatian terhadap madrasah. Walaupun tentu Satker ataupun pekerjaan Kementerian Agama ini banyak. Kalau Kemendikbud kan hanya fokus di fungsi pendidikan. Kementerian Agama ini kementerian super sekali, banyak urusannya dari kawin, talak, cerai, pendidikan dan segala hal pokoknya. Tapi kan tetap fungsi anggaran pendidikan Islam terbesar 80% mungkin 70% sampai 80% sehingga fokus ini harus jelas. Madrasah yang

hampir 90% ini yang swasta perlu perhatian khusus, walaupun di pesantren dan diniyah sudah mulai perhatian. Walaupun memang perhatian Pemda juga cukup baik, tapi tidak cukup di Pemda tentunya.

Kemudian di sini poin 4 juga bantuan pemberian ekonomi keluarga terhadap Covid ini sebaiknya walaupun ini fungsi di Kementerian Sosial atau Kementerian UMKM, tapi ini sebaiknya fokus di guru-guru Madrasah, terutama guru-guru Madrasah Diniyah ya. Ini sangat banyak diniyah ini walaupun mungkin Kementerian Agama fokus di pendidikan madrasah ya, formal maksudnya madrasah formal, tapi yang non formal model diniyah saya pikir ini harus mendapat perhatian, karena investasi dan efek madrasah diniyah itu luar biasa terhadap pembangunan keagamaan di Indonesia.

Bantuan operasional Ormas Keagamaan. Ini juga terima kasih, ini bagus, tapi jangan hanya terus ke satu atau dua ormas. Karena di negeri ini bukan dua Ormas yang sering disebut-sebut, negeri ini Anggota BPUPKI itu pendiri perintis republik ini kebanyakan dari Ormas Keagamaan. Mungkin yang berdiri sebelum republik ini berdiri banyak, ada 10 sampai 15, setiap Ormas mempunyai basis ulamanya, itu terima kasih.

Kemudian hal lainnya juga catatan penting saya tentunya tadi disebutkan oleh rekan saya dari Gerindra, alhamdulillah Pak Menteri sudah memberikan isyarat tentang hati-hati terhadap radikalisme. Kalau *feeling* mantan jenderal kan *feelingnya* kuat, hati-hati radikalisme, ternyata terbukti, terbukti terbalik maksudnya. Jadi kalau arahnya ke A biasanya efeknya ke B. Jadi justru ulama yang sedang meresmikan hafal Quran dihajar sama radikalisme, premanisme ini juga saya husnuzan Pak Menteri sedang memberikan isyarat yang berbanding terbalik.

Kemudian ini juga relevan dengan Undang-Undang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama yang menjadi prolegnas di DPR. Saya pikir nanti pembahasannya bersama Kementerian Agama. Jadi prioritas untuk ini, dan hal-hal lainnya juga yang perlu perhatian dari Pak, dari Kementerian adalah saya tidak akan membahas dari sisi-sisi radikalisme tapi saya lebih kepada kita introspeksi ke dalam beban Kementerian Agama ini luar biasa Pak. Madrasah yang swasta hampir 90% atau 80% sampai 90% ini madrasah swasta. Semangat keagamaan mereka luar biasa, semangat mendirikan secara mandiri ini perlu perhatian khusus. Coba cek kalau turun ke bawah, bacaan Quran anak-anak ibtidaiyah sama tsanawiyah, aliyah mungkin lebih baik atau banyak yang di bawah Dikbud lebih bagus, apalagi di bawah pesantren. Dan saya cek di bawah ketika saya menyeleksi untuk kuliah di Libia, kuliah di Timur Tengah untu pendalaman syari'ah, dari teman-teman madrasah Aliyah itu tidak cukup kapasitasnya. Apalagi baca kitab kuning, dibanyak daerah terjadi krisis ulama. Justru radikalisme itu lahir dari orang yang pemahaman agamanya tidak sempurna. Tidak menyeluruh, agama apa apapun. Ketika pemahaman agamanya tidak universal, tidak moderasi, tidak wasatiyah, yang wasatiyah itu adalah orang yang mempunyai pemahaman agama baik. Tentu dalam agama apapun, terutama agama Islam.

Jadi introspeksi terhadap kualitas pendidikan madrasah ini lebih baik kita bicara ke dalam, banyak apalagi ditingkat penyuluh agama yang di bawah naungan Bimas-bimas Islam itu juga pekerjaan banyak Pak. Jadi kita juga

sering berdialog dengan dan saya kalau Reses selalu menyempatkan ketemu dengan penyuluh agama, dan saya menikmati aspirasi dari para penyuluh agama ini tentang dinamika dakwah, dinamika keagamaan di bawah. Dan kita sering berpartner dengan penyuluh agama. Ini pekerjaan-pekerjaan yang justru di dalam Kementerian Agama juga perlu perhatian besar, dan insyaallah kita tidak produktiflah buat isu-isu yang tidak relevan dengan itu isu-isu awal Orde Lama Pak, sekarang ini sudah sudah *god looking*, insyaallah apa yang diisyaratkan Pak Menteri.

Itu beberapa catatan saya, pekerjaan besar di Kementerian Agama ini dan reformasi yang dilakukan Pak Menteri saya lihat juga ada isyarat-isyarat yang menggembirakan terhadap perubahan-perubahan birokrasi di wilayah maupun daerah. Terima kasih Pak Menteri.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Nur Hasan dari PKS, kita ke virtual pak Menteri, mohon yang virtual juga jangan panjang-panjang ya, masa lebih panjang yang virtual daripada yang fisik. Silakan Bu Anisa Syakur langsung to the point saja Bu tidak usah banyak yang lain-lain, silakan Bu. O lagi makan rupanya dia, ini mau makan dulu atau mau ngomong Bu? Ya lanjut Bu, kalau lagi makan tiga menit Bu ya, *unmute* dulu Bu, Bu speaker Ibu hidupkan dulu bu, di-*unmute* dulu bu. Lanjut ibu berarti bermasalah ini, lanjut ke Pak Nurhadi, Pak Nurhadi dari Nasdem. Ini tidak bisa lama-lama ini Covid ini rapatnya.

F- PARTAI NASDEM (NURHADI, S.Pd.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII, dan

Yang saya hormati Pak Menteri Agama beserta seluruh jajaran Kementerian Agama.

Singkat saja karena yang bertanya ini masih banyak yang di belakang saya, saya mengingatkan Pak Menteri pada RKA K/L yang sudah dipaparkan tadi saya mengingatkan apakah dana BOS untuk lembaga di lingkungan Kementerian Agama, lembaga pendidikan di Kementerian Agama apakah itu sudah benar-benar 2021 nanti itu tidak ada pengurangan, atau mungkin malah justru ada penambahan? Saya minta penjelasannya Pak Menteri.

Kemudian yang kedua saya juga mengingatkan Pak Menteri terus saya selalu ingatkan untuk honor PPP guru non PNS di lingkungan Kementerian Agama yang terutang oleh negara sejak tahun 2018. Apakah ini juga sudah ter-cover pak Menteri di anggaran tahun 2021? Karena saya khawatir di 2020 nanti anggarannya masih kurang dan negara masih memiliki kekurangan

dalam tanggung jawab pembayaran PPP ini kepada saudara-saudara kita guru non PNS di lingkungan Kementerian Agama. Karena dengan honor yang hanya Rp.200.000 sampai Rp.300.000,- saja per bulan guru-guru kita ini sangat berat Pak Menteri dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Mohon dengan segala kerendahan hati saya minta Pak Menteri untuk memperhatikan dari beberapa aspirasi yang saya sampaikan tadi yaitu terkait dana BOS dan juga honor PPP yang terutang. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Terima kasih Pak Nurhadi dari Nasdem, kami persilakan pak Hidayat Nur Wahid, silakan Pak Hidayat Nur Wahid.

F- PKS (Dr. H. M. HIDAYAT NURWAHID, M.A.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

**Pak Ketua dan Pimpinan yang saya hormati,
Rekan-rekan Anggota Komisi VIII yang saya hormati,
Bapak Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

Saya kira langsung saja pertama kita apresiasi Pak Menteri Agama yang kemarin sudah menyepakati untuk mengembalikan pemotongan dana BOS Rp.100.000 per siswa itu. Yang perlu saya tanyakan adalah bagaimana komitmen untuk mengembalikannya Pak Menteri, apakah itu sudah bisa disampaikan sekarang? Atau adanya di mana? Dan kemudian bagaimana itu terwujud juga di dalam anggaran pada tahun 2020 maupun di tahun 2021?

Yang kedua Pak Menteri dari yang tadi telah disampaikan itu ada hal yang menurut saya sangat perlu untuk ditegaskan kembali terutama saya apresiasi bahwa tetap ada anggaran bantuan untuk pesantren dan juga untuk madrasah. Tetapi kalau dilihat daripada jumlah anggarannya untuk tahun 2021 ternyata menurun dibanding tahun 2020. Padahal dengan adanya Covid-19 pastilah pesantren dan madrasah memerlukan bantuan tambahan, karenanya kita usulkan untuk minimal sama yaitu 2,6 triliun atau ditambahkan lagi tahun ini.

Yang ketiga tadi Pak Menteri juga menyampaikan tentang adanya program untuk bantuan bagi mahasiswa yang ada di dalam negeri. Karena saya dari Dapil Jakarta dan luar negeri ya saya mengusulkan atau menanyakan apakah juga anggaran itu sudah masuk untuk bantuan mahasiswa kita yang berada di luar negeri? Yang di Mesir, yang di Sudan, di Pakistan, di Malaysia, di Maroko mereka sekarang amat sangat kesulitan Pak Menteri akibat daripada Covid-19. Ini sudah saya usulkan sejak dulu tapi

realisasinya saya belum melihat para pihak yang pastilah. Saya berharap kalau tahun 2020 ini belum terlaksana maka tahun 2021 Pak Menteri anggaran untuk mereka sudah bisa diwujudkan karena mereka juga anak bangsa yang terdampak juga akibat pandemi Covid-19.

Yang berikutnya Pak Menteri, ini terkait dengan program yang kemarin diramaikan yaitu tentang sertifikasi para da'i atau da'i bersertifikat. Inikan penolakan sangat meluas Pak Menteri, dan bahkan MUI sudah menyampaikan penolakannya, Muhammadiyah menyampaikan penolakannya. Kemarin bahkan Pak Wakil ketua Jones Indonesia pak JK juga menyampaikan kritik dan penolakannya, tapi saya mendapatkan informasi bahwa program ini akan tetap dilaksanakan dan bahkan beberapa hari yang akan datang Pak Menteri sudah akan mengumpulkan para Ormas-oraas Islam untuk *launching* program sertifikasi da'i dan para penceramah. Ini kan tidak sesuai dengan aspirasi yang berkembang Pak Menteri dan juga tidak sesuai dengan pembahasan di Komisi VIII. Komisi VIII yang saya pahami secara prinsip tidak setuju, dan menolak dan apalagi pak Menteri program itu untuk tahun 2020 – 2021 juga tidak muncul, tidak ada begitu.

Nah kalau itu program 2020 juga tidak ada, dalam program yang disepakati dengan Komisi VIII tahun 2021 juga tidak ada kenapa dipaksakan muncul Pak Menteri? Toh yang disampaikan pada rapat beberapa hari yang lalu bahwa program itu bukan keharusan, juga tidak ada kewajibannya dan tidak ada konsekuensinya tidak ada pemikiran Pak Menteri saya kira teman-teman di Komisi VIII dan juga di publik agar itu dihentikan saja dan untuk peningkatan masa dan lain sebagainya diserahkan ke masing-masing Ormas, kita semuanya sepakat Islam ya *rahmatan lil'alamiin* Islam yang menghadirkan moderasi dan sebagainya.

Terakhir pak Menteri tadi kawan-kawan juga sudah menyampaikan tentang kasus radikalisme dan terror terhadap ustaz, penceramah, da'i yang beliau adalah seorang yang pandai berbahas arab, hafal Al Qur an, good looking beliau aktif di masjid tapi justru beliau yang menjadi korban dari radikalisme orang yang ini masih saya yakin presiden juga yakinlah kalau itu juga yang disampaikan oleh Syeikh Ali Jaber. Nah publik sesungguhnya menunggu apa pernyataan Pak Menteri Agama maksud saya karena bahkan Menko Polkam saja pernyataannya demikian amat sangat menyedihkan. Demikian amat sangat empati. Fari Kementerian Agama memang sudah disampaikan pernyataan oleh Dirjen Penerangan Agama Islam Pak Zubaidi. Tapi menurut saya ini sesungguhnya adalah momentum Pak Menteri untuk hadir membela umat, hadir mengayomi umat atau para ustaz yang mereka itu sudah moderat, mereka membantu pemerintah, mereka sangat mendukung Indonesia. Tapi justru sekarang mendapat musibah semacam ini tapi kita belum mendengar pernyataan apa pun dari Pak Menteri, khususnya pak Menteri Agama yang paling duluan malah kok malah keduluan sama pak Menkopolhukam.

Pak Menteri saya berharap ini semua bisa dihadirkan menjadi sapa yang membawa kepada umat ada yang melindungi, umat ada yang mengayomi para ulama dan da'i kita yang moderat terlindungi dari segala bentuk radikalisme dan terorisme. Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh

Terima kasih pak Hidayat Nurwahid dari PKS, nanti karena ini covid mohon pihak sekretariat nanti per fraksi mungkin 1 kecuali F-PDIP dan Golkar dan Gerindra mungkin 2, 2 ya, yang lain satu-satu saja.

Pak Menteri tadi yang disampaikan Pak Hidayat Nurwahid saya kita memang masih ada simpang siur ini pak Kamarudin. Sebenarnya pelatihan itu bukan pelatihan da'i tapi pelatihan ke wawasan kebangsaan, jadi bukan sertifikatnya yang dikedepankan, ini masih simpang siur ini. Saya kira yang dilakukan Dirjen Bimas Islam ini bagus maksudnya, mengundang para da'i untuk wawasan kebangsaan kan begitu, ada masalah NKRI, Bhinneka tunggal Ika, itu bagus tapi yang di depan, jangan dikedepankan sertifikatnya pak Menteri. Jadi seolah-olah pak Menteri ini memberi sertifikat kepada para da'i, padahal kan pelatihan wawasan kebangsaannya itu yang dikedepankan.

Ya kalau itu kita dukung pak Menteri, bukan hanya da'i pak kalau bisa dilingkungan mahasiswa perguruan Islam Negeri atau Swasta itu bisa Kementerian Agama juga buat pelatihan wawasan kebangsaan pak Kamar. Jadi kita perluas pak tentang wawasan kebangsaan ini, siapapun harus bisa terlibat kalau itu pak. Jadi jangan dikedepankan sertifikatnya pak Menteri seolah-olah ini Menteri Agama ngasih sertifikat ke ulama sama da'i dan lain sebagainya itu. Padahal yang saya dialog dengan pak Kamar dengan pak siapa ya? Pak Tarmizi ya itu maksud dan tujuannya baik, ya dan itu sudah saya sampaikan di TV ONE waktu itu, kalau itu wawasan kebangsaan siapa pun kita dukung, iya kan untuk NKRI, Pancasila final, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Saya kira bagus, tapi tolong narasinya jangan sertifikatnya pak Kamar. Jadi kalau orang ikut pelatihan dan dapat sertifikat itu biasa, itu biasa itu, tapi jangan Pak Wamen jangan sertifikatnya yang dikedepankan pak, tapi ini agenda bagus pak Menteri. Jadi biar ulama sama lainnya itu juga paham tentang kebangsaan. Saya kira siapa pun kita mendukung pak untuk keutuhan negara kita kesatuan Republik Indonesia.

Saya kira cukup pak Laksamana Madya Moekhlas Sidik. O ini kalau tentara ini tertib ya, kalau tidak saya tegur tentaranya. Terima kasih pak Moekhlas, silakan Pak Menteri, mudah-mudahan jam 16.00 WIB tepat kita selesai karena memang arahan dari Pimpinan DPR kalau bisa jam 16.00 WIB rapat-rapat harus bisa selesai Pak. Silakan Pak Menteri.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL (PURN) FACHRUL RAZI):

Baik terima kasih pak.

Saya kira masukan-masukan sangat bagus sekali akan menjadi perhatian kami, saya mulai dari yang terakhir dulu. Memang kami juga masih berdiskusi tentang judul itu, dan saya kemarin mendapat, yang lalu juga

mendapat masukan dari bapak Pimpinan kami akan bahas. Kami akan konsultasi dari orang yang menyatakan itu saya kira bapak paham in sya allah nanti setelah kami diskusi kami bisa memutuskan yang terbaik untuk itu. Tapi terima kasih sekali masukan-masukannya.

Kemudian masalah Menteri Agama kok tidak segera merespon masalah ulama yang ditusuk itu? Saya kira kami respons cepat pak, tapi mungkin tidak belum tersebar luas, tapi kami sama sikapnya dengan yang bapak sampaikan tadi. Apa pun alasannya, apa pun motivasinya tidaklah dibolehkan orang bisa menusuk yang lain, apalagi itu ulama gitu ya. Sebetulnya bukan itu pak, ada satu lagi saya kira agak mirip juga sudah menyebar luas juga yang sedang memimpin salat subuh ditusuk gitu ya, hampir mirip juga dan kami sedang merumuskan juga tanggapannya supaya jangan persis sama-sama dengan yang awal tadi, mungkin sedikit lebih bermakna dari aspek agama.

Tapi kembali itu menjadi perhatian kami di Kementerian Agama, dan kami juga sepakat menggarisbawahi ulama itu adalah mohon maaf wakil nabi di muka bumi ini, mereka harus betul-betul mendapat perlindungan yang baik dari kita semua.

Kemudian masukan-masukan yang lain saya sepakat sekali tentang apa ada pintu lain tentang uang-uang itu kok bisa bocor ke mana-mana? Saya kira itu menjadi perhatian kami semua, bapak Irjen mungkin bisa ngasih masukan sedikit tentang kebocoran itu. Karena sudah beliau tanggapi tentang itu coba agak cepat saja.

IRJEN KEMENAG RI:

Mohon izin bapak Menteri.

Mohon izin Pimpinan. Jadi pada kesempatan ini memang informasi ini sudah benar adanya dan kami sedang melakukan audit investigasi khusus terutama yang berkembang di Bekasi dan daerah-daerah lain. Dan kami juga sesuai arahan Pak Menteri sudah menggalakkan tim siber pungli ini secara masif kita berikan dan juga ada upaya-upaya peringatan dini kepada semua pengelola. Dan ini akan dilakukan secara masif, ini tentu akan kita lakukan secara terstruktur, terukur, komprehensif dan kesinambungan. Terima kasih.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL (PURN) FACHRUL RAZI):

Terima kasih Pak.

Kami lanjutkan lagi, madrasah swasta saya kira berkali-kali sudah diangkat, saya kira sangat menjadi perhatian kami ke depan. Kemudian juga Tukin untuk penyuluh maupun guru non PNS ini, dan sudah kami ajukan mudah-mudahan ada pengajuan khusus ini bisa sudah kami koordinasikan dengan Dirjen Anggaran, mudah-mudahan akan mendapat dukungan untuk ini. Terima kasih Pak, saya kembalikan kepada bapak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Menteri responsnya, sangat bagus terutama pak Irjen saya kira menjadi perhatian kita semua pak, bukan hanya dari Anggota DPR, kalau ada laporan dari pihak lain kita sama-sama tindak lanjuti pak.

Baik, kita tampilkan draf kesimpulan, sekali lagi para Anggota nanti untuk memperdalam per bidang atau Pak Irjen nanti kita akan RDP, kelihatannya agendanya mulai besok ini. Saya bacakan Pak Menteri para Anggota, Pimpinan nanti kalau ada perubahan mohon dikoreksi.

DRAF KESIMPULAN RAPAT KERJA
KOMISI VIII DPR RI DENGAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2020 – 2021
Senin, 14 September 2020

Pada rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama Republik Indonesia dengan agenda Pembahasan RKA K/L Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami pagu anggaran Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.66.961.386.828.000,- yang dialokasikan sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Jenderal sebesar Rp.2.2 triliun;
 - b. Inspektorat Jenderal sebesar Rp.170 miliar;
 - c. Dirjen Pendidikan Islam sebesar Rp.52,5 triliun;
 - d. Dirjen Bimas Islam sebesar Rp.5,7 triliun;
 - e. Dirjen Bimas Kristen sebesar Rp.1,8 triliun;
 - f. Dirjen Bimas Katolik sebesar Rp.899 miliar;
 - g. Dirjen Bimas Hindu sebesar Rp.803 miliar;
 - h. Dirjen Bimas Budha sebesar Rp.272,6 miliar;
 - i. Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh sebesar Rp.1,593 triliun;
 - j. Badan Litbang dan Diklat sebesar Rp.693 miliar;
 - k. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebesar Rp.97, sekian miliar.

Totalnya sesuai dengan yang saya sampaikan tadi sebesar Rp. enam puluh enam triliun Sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan miliar, ah rupiah, saya ulangi, Rp. enam puluh enam triliun Sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam ribu, ulangi lagi enam puluh enam triliun Sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan rupiah, salah lagi? Oke ulangi lagi terakhir,

terakhir ribu ya, Enam puluh enam triliun sembilan ratus karena ini direkam pak Menteri kalau salah-salah nanti ini pak. Enam puluh enam triliun sembilan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh delapan rupiah, oh delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah. (Rp.66.961.386.828.000) Iya, ini terlalu banyak ini nya ini.

2. Kemudian selanjutnya Komisi VIII DPR RI akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap RKA K/L Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 bersama pejabat Eselon I Kementerian Agama Republik Indonesia.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Memprioritaskan peningkatan anggaran tahun 2021 untuk program pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 dilingkungan Kementerian Agama republik Indonesia; (Tadi pak kalau ada peningkatan dari 2,8 triliun kalau bisa ini nanti kita perdalam di RDP).
 - b. Meningkatkan anggaran untuk program kerukunan umat beragama sebagai upaya mempererat implementasi modernisasi beragama; (Ini sekaligus ini juga saran kalau memungkinkan nanti kita akan bahas di RDP).

Saya kira itu pak Menteri ada yang perlu direvisi pak, ditambahi atau dikurangi dari kata per kata atau angka per angka silakan Pak. Cukup ya? Anggota? Cukup? Pimpinan? Cukup. Silakan pak Menteri kalau ada penutup.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA (JENDERAL (PURN) FACHRUL RAZI):

Kembali kami mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI dan bapak, ibu sekalian atas masukan-masukannya, mudah-mudahan ini kami yakin akan sangat bermanfaat buat kami dalam melakukan tugas untuk lebih baik pada masa yang akan datang. Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumussalam Warahmattullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, para Dirjen, Pak Sekjen dan para Eselon II atas kerja sama dalam melaksanakan Raker hari ini, sehingga kita tidak berlama-lama membahasnya. Saya kira ini rapat yang paling cepat

pak, selama Komisi VIII ada, bukan hanya Kementerian Agama juga kementerian-kementerian yang lain pak.

Alhamdulillah terima kasih para Anggota, para Pimpinan atas izin Pak Menteri dan para Anggota, para Pimpinan dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabil'alamiin*, rapat kerja ini saya nyatakan ditutup.

Terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan, kepada Allah SWT mohon ampun.

Wassalamu'alaikum Warahmattullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 15.51 WIB)

Jakarta, 14 September 2020

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT,

Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.

NIP. 197309261997031001